

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD), TRANSPARANSI ANGGARAN, DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Donny Tirtana Afrizal¹, Rosy Armaini², Rahmawaty Hasibuan³

^{1, 2, 3}Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Sriwijaya Negara, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: donnytirtana234@gmail.com

Article History

Received: 23-07-2026

Revision: 17-08-2026

Accepted: 25-08-2026

Published: 31-08-2026

Abstract. The quality of local government financial reporting remains a concern because an Unqualified Opinion (WTP) does not fully reflect the absence of internal control system (SPI) weaknesses or non-compliance with regulations. This situation is evident in the Siak Regency Government; despite receiving an Unqualified Opinion for over a decade, Audit Result Reports (LHP) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) indicate that the government still faces SPI weaknesses and material non-compliance. This study aims to analyze the influence of the Local Government Information System (SIPD), budget transparency, and financial management accountability on the quality of financial reporting. A quantitative approach was employed, utilizing primary data collected via questionnaires from 63 respondents, comprising Budget User Proxies (KPA), treasurers, and finance staff. Data analysis was conducted using multiple linear regression, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination. The results indicate that SIPD, budget transparency, and accountability simultaneously have a significant effect on the quality of financial reporting. Individually, SIPD and accountability have a positive and significant effect, whereas budget transparency does not have a significant effect. Accountability emerged as the most dominant variable. The research model explains 56.2% of the variation in financial reporting quality.

Keywords: SIPD, Budget Transparency, Financial Management Accountability, Quality of Financial Reporting.

Abstrak. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah masih menjadi perhatian karena opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum sepenuhnya mencerminkan terbebasnya pengelolaan keuangan dari kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Kondisi tersebut juga ditemukan di Pemerintah Kabupaten Siak, yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menghadapi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan material meskipun telah memperoleh opini WTP selama lebih dari satu dekade. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), transparansi anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada 63 responden, terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara, dan staf keuangan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda, uji *t*, uji *F*, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD, transparansi anggaran, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Secara parsial, SIPD dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan transparansi anggaran tidak berpengaruh signifikan. Akuntabilitas menjadi variabel paling dominan. Model penelitian menjelaskan 56,2% variasi kualitas pelaporan keuangan.

Kata Kunci: SIPD, Transparansi Anggaran, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kualitas Pelaporan Keuangan.

How to Cite: Afrizal, D. T., Armaini, R., & Hasibuan, R. (2026). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Transparansi Anggaran, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 4 (4), 5855-5869. <http://doi.org/10.54373/hijm.v4i4.7217>

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) menuntut pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Samsiah, 2023). Kualitas pelaporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan telah terbebas dari kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut relevan dengan Pemerintah Kabupaten Siak yang telah memperoleh opini WTP selama lebih dari satu dekade, tetapi masih menghadapi sejumlah temuan pemeriksaan. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 diharapkan dapat mendukung integrasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Namun, penerapan sistem informasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kualitas data, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, dan proses pengelolaan keuangan yang mendukungnya (Phita, 2025; Aprilia, 2025).

Fenomena empiris di Kabupaten Siak menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan meskipun opini WTP telah diperoleh secara berkelanjutan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, ditemukan sejumlah kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan selama periode 2022–2024.

Tabel 1. Temuan Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan pada Pemerintah Kabupaten Siak (TA 2022-2024)

Tahun LHP	Opini	Nomor & Tanggal LHP	Intisari Temuan Signifikan	Dampak terhadap Laporan Keuangan
2022	WTP	18.B/LHP/XVIII. PEK/05/2023 (22 Mei 2023)	Penatausahaan Aset Tetap belum tertib; Kekurangan volume pada paket pekerjaan jalan dan jembatan.	Ketidakakuratan penyajian nilai Aset Tetap di Neraca.
2023	WTP	16.B/LHP/XVIII. PEK/05/2024 (20 Mei 2024)	Ketidaksesuaian spesifikasi kontrak fisik; Penatausahaan piutang pajak daerah belum optimal.	Potensi <i>overstated</i> pada realisasi belanja modal.
2024	WTP	17.B/LHP/XVIII. PEK/05/2025 (26 Mei 2025)	Kekurangan penetapan PBB-P2 (min. Rp311 Juta); Kekurangan volume pada 21 paket pekerjaan fisik.	Piutang dan Aset Tetap tidak mencerminkan nilai perolehan yang andal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian opini WTP masih disertai persoalan pada aspek pengendalian, kepatuhan, dan keandalan pengelolaan informasi keuangan. Dengan demikian, kualitas pelaporan keuangan perlu dipahami tidak hanya dari hasil opini audit, tetapi juga dari proses yang mendukung penyusunan laporan tersebut. Dalam konteks ini, penerapan SIPD, transparansi anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi faktor yang relevan untuk dikaji. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SIPD berpotensi meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Fitriasari (2024) menemukan bahwa penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bandung. Hasil serupa dikemukakan Paat dan Saleh (2023) di Kota Cimahi yang menunjukkan bahwa implementasi SIPD dapat mendukung peningkatan akurasi data dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.

Transparansi anggaran juga dilaporkan memiliki hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan. Sari, Asmeri, dan Yani (2024) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Datar. Farika, Albahi, dan Saleh (2023) juga menemukan pengaruh positif transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BAPENDA Kota Pekanbaru. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan dipandang sebagai faktor penting dalam mendukung kualitas pelaporan keuangan. Zubaidah dan Nugraeni (2023) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Sleman. Aprilia et al. (2025) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di Kota Palembang. Secara simultan, Gusliandi, Lubis, dan Azhar (2023) menemukan bahwa SIPD, transparansi, dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada SKPK Kota Langsa.

Meskipun penelitian terdahulu secara umum menunjukkan hubungan positif antara SIPD, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan, hasil tersebut belum dapat secara langsung digeneralisasikan pada Pemerintah Kabupaten Siak. Perbedaan karakteristik daerah, kondisi organisasi, tingkat implementasi SIPD, serta mekanisme pengelolaan keuangan dapat menghasilkan temuan yang berbeda. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menguji ketiga faktor tersebut secara simultan dalam konteks Kabupaten Siak, khususnya pada kondisi ketika opini WTP telah diperoleh secara berkelanjutan tetapi temuan terkait SPI dan ketidakpatuhan masih ditemukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada keterbatasan bukti empiris mengenai pengaruh SIPD, transparansi anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan secara simultan terhadap kualitas pelaporan keuangan dalam konteks Pemerintah

Kabupaten Siak. Penelitian ini tidak menempatkan temuan BPK sebagai bukti langsung mengenai rendahnya kualitas laporan keuangan, tetapi menggunakannya sebagai konteks empiris yang menunjukkan masih adanya persoalan dalam proses pengelolaan keuangan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menguji secara terintegrasi peran faktor teknologi melalui SIPD, faktor keterbukaan melalui transparansi anggaran, dan faktor pertanggungjawaban melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam menjelaskan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Secara kontekstual, penelitian ini memperluas bukti empiris pada Kabupaten Siak yang memiliki karakteristik berupa perolehan opini WTP secara berkelanjutan sekaligus masih menghadapi temuan pemeriksaan terkait SPI dan ketidakpatuhan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan aspek pengelolaan keuangan yang perlu diperkuat untuk mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh penerapan SIPD terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak; (2) pengaruh transparansi anggaran terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak; (3) pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak; dan (4) pengaruh SIPD, transparansi anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan secara simultan terhadap kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Transparansi Anggaran, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan sebagai variabel independen terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan sebagai variabel dependen pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pada tahun 2026. Populasi penelitian terdiri atas 26 OPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria responden, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kepala bagian atau staf keuangan, serta bendahara, memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam

menggunakan SIPD atau terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Setiap OPD diwakili oleh tiga responden sehingga diperoleh 78 responden.

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Instrumen penelitian menggunakan Skala Likert lima poin, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju (Sugiyono, 2022). Indikator setiap variabel disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan penelitian terdahulu. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 melalui statistik deskriptif, uji kualitas instrumen, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.

Uji validitas dilakukan dengan korelasi *Pearson Product Moment*. Pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel dan signifikansi $< 0,05$. Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha*, dengan kriteria instrumen reliabel apabila nilainya $\geq 0,70$. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Data dinyatakan normal apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$. Tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 . Model dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi uji Glejser $> 0,05$. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh Penerapan SIPD, Transparansi Anggaran, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dengan persamaan:

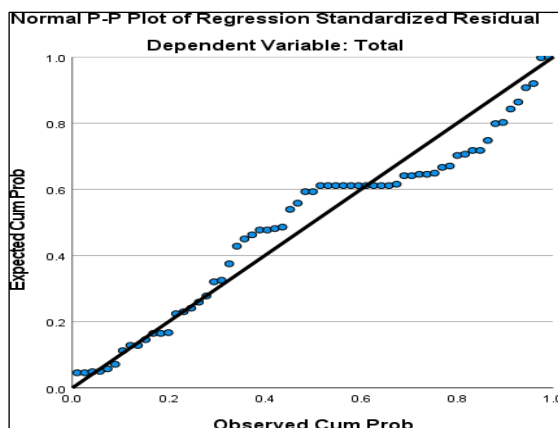
$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5%. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruhnya secara simultan. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi $< 0,05$.

HASIL

Uji Normalitas

Pada uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Hasil yang sama ditunjukkan pada grafik normal p-p plot, dimana terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mendekati garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menyalahi asumsi normalitas.



Gambar 1. Grafik Normal P-P Plot

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0
	Std. Deviation		1
Most Extreme Differences	Absolute		.137
	Positive		.097
	Negative		-.137
Kolmogorov-Smirnov Z			1.091
Asymp. Sig. (2-tailed)			.185
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.164 ^c
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.155
		Upper Bound	.174

Uji statistik dilakukan dengan menggunakan uji statistik nonparametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Tampak pada tabel di atas hasil pengujian menunjukkan nilai sig. lebih besar dari 0,05 ($0,185 > 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui uji statistik terbukti data residual berdistribusi normal.

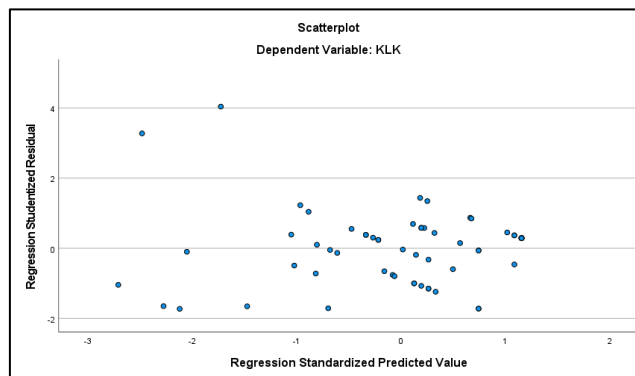
Uji Multikolonieritas

Tabel 4. Uji multikolonieritas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.961	3.032		2.955	.004		
	SIPD	.252	.118	.194	2.138	.037	.856	1.169
	TA	.094	.110	.080	.861	.393	.827	1.210
	AKP	.584	.084	.644	6.961	.000	.827	1.209

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui pada perhitungan nilai Tolerance tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan yang sama ditunjukkan pada nilai VIF, dimana tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji heteroskedastisitas

Pengujian asumsi heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik Scatterplot antara nilai prediksi (Regression Standardized Predicted Value) dengan nilai residualnya (Regression Studentized Residual). Hasil pengujian menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik Scatterplot menyebar secara acak di sekitar angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, baik itu pola melebar, menyempit, maupun bergelombang. Sebaran titik yang tidak teratur ini mengindikasikan bahwa varians residual dari model regresi adalah konstan (homoskedastis). Dengan demikian, salah satu asumsi klasik dalam analisis regresi, yaitu tidak terjadinya heteroskedastisitas, telah terpenuhi.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 5. Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	124.197	3	41.399	27.510	.000 ^b
Residual	88.787	59	1.505		
Total	212.984	62			

Hasil uji statistik F dapat ditunjukkan dari nilai sig lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen sehingga hipotesis dapat diterima. Dapat disimpulkan

terbukti penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), transparansi anggaran, akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Siak.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 6. Uji sifnikansi parsial (uji t)

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.974	3.023		2.969	.004
1 SIPD	.251	.118	.193	2.126	.038
TA	.097	.109	.083	.890	.377
AKP	.582	.084	.642	6.933	.000

Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil pada tabel Coefficients, berikut adalah rincian pengaruh masing-masing variabel:

- Variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki nilai signifikansi 0,038 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Siak.
- Variabel transparansi anggaran memiliki nilai signifikansi 0,377 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel transparansi anggaran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Siak.
- Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,974 + 0,251 X_1 + 0,097 X_2 + 0,582 X_3$$

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.764 ^a	.583	.562	1.227

Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) diketahui nilai R sebesar 0,764, hal ini menunjukkan variabel penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), transparansi anggaran, akuntabilitas pengelolaan keuangan kualitas pelaporan keuangan sebagai variabel independen memiliki hubungan yang kuat sebesar 76,4 % dengan variabel kualitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Siak sebagai variabel dependen. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,562 berarti variabel penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), transparansi anggaran, akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Siak, letak geografis sebesar 56,2 %, sedangkan sisanya 43,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang diteliti dalam penelitian ini.

DISKUSI

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SIPD dalam mendukung proses pengelolaan keuangan, semakin besar pula kontribusinya terhadap kualitas laporan yang dihasilkan. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mempercepat proses pencatatan, mengurangi pengulangan input data, meningkatkan konsistensi informasi antarunit kerja, serta memudahkan proses pemantauan dan rekonsiliasi data keuangan. Temuan tersebut sejalan dengan Fitriyanti (2024) di Kota Bandung dan Paat dan Saleh (2023) di Kota Cimahi yang menemukan bahwa implementasi SIPD berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kesamaan hasil tersebut dapat dijelaskan oleh fungsi SIPD sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pengelolaan keuangan daerah. Ketika sistem digunakan secara konsisten dan didukung oleh kemampuan operator, integrasi data dapat mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan ketepatan penyajian informasi. Yusina, Gaffar, dan Naholo (2025) di Kota Gorontalo juga memperoleh hasil serupa, yang memperkuat indikasi bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan dapat menjadi salah satu faktor pendukung kualitas pelaporan pada pemerintah daerah.

Namun, pengaruh positif SIPD dalam penelitian ini tidak berarti bahwa penerapan sistem secara otomatis menghilangkan seluruh permasalahan pengelolaan keuangan. Temuan BPK pada Pemerintah Kabupaten Siak selama periode 2022–2024 masih menunjukkan adanya persoalan terkait penatausahaan aset, penetapan pajak daerah, dan pekerjaan fisik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi berfungsi sebagai instrumen pendukung, sedangkan kualitas informasi yang dihasilkan tetap bergantung pada akurasi data yang dimasukkan, kompetensi pengguna, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap prosedur. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelaporan melalui SIPD perlu disertai penguatan kompetensi operator, pemeliharaan infrastruktur teknologi, dan pengawasan terhadap proses input serta verifikasi data.

Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Berbeda dengan SIPD dan akuntabilitas, Transparansi Anggaran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi anggaran belum secara langsung menjadi faktor yang menentukan kualitas laporan keuangan dalam konteks Pemerintah Kabupaten Siak. Temuan tersebut perlu dipahami dengan membedakan antara ketersediaan informasi dan pemanfaatan informasi. Informasi anggaran yang telah dipublikasikan belum tentu meningkatkan kualitas pelaporan apabila informasi tersebut tidak mudah dipahami, tidak diperbarui secara memadai, atau tidak digunakan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Temuan ini berbeda dengan hasil Sari, Asmeri, dan Yani (2024) di Kabupaten Tanah Datar serta Farika, Albahi, dan Saleh (2023) di BAPENDA Kota Pekanbaru yang menemukan pengaruh positif transparansi terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan karakteristik organisasi, mekanisme penyediaan informasi, tingkat pemanfaatan informasi publik, serta kondisi pengendalian keuangan pada masing-masing daerah. Dengan kata lain, transparansi dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas pelaporan apabila keterbukaan informasi diikuti oleh akses yang memadai, pemahaman pengguna, dan mekanisme tindak lanjut terhadap informasi yang tersedia.

Konteks Kabupaten Siak memperlihatkan pentingnya aspek tersebut. Meskipun pemerintah daerah memperoleh opini WTP, masih terdapat temuan BPK mengenai kekurangan penetapan PBB-P2 dan kekurangan volume pada sejumlah pekerjaan fisik. Temuan tersebut tidak dapat secara langsung disebabkan oleh rendahnya transparansi, tetapi menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum cukup untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan secara optimal. Transparansi perlu ditempatkan sebagai bagian dari

mekanisme akuntabilitas yang lebih luas, bukan sebagai faktor yang berdiri sendiri. Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa peningkatan transparansi sebaiknya tidak hanya diarahkan pada publikasi dokumen anggaran. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kualitas informasi yang disampaikan, termasuk keterbacaan, ketepatan waktu, kelengkapan, dan kemudahan akses. Transparansi yang disertai ruang partisipasi dan mekanisme pengawasan publik berpotensi memberikan fungsi kontrol yang lebih kuat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan serta menjadi variabel yang memiliki pengaruh relatif paling dominan dalam model. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan sangat berkaitan dengan kemampuan aparatur untuk mempertanggungjawabkan proses pengelolaan keuangan, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian laporan. Hubungan tersebut dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas mendorong aparatur untuk memastikan setiap transaksi memiliki dasar yang jelas, bukti yang memadai, dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Ketika pertanggungjawaban dilaksanakan secara konsisten, proses pencatatan dan pelaporan cenderung lebih tertib sehingga meningkatkan keandalan informasi keuangan. Dengan demikian, kualitas pelaporan tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh perilaku dan tanggung jawab pihak yang mengoperasikan sistem tersebut.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Aprilia, Satriawan, dan Dwitayanti (2025) di Kota Palembang serta Zubaidah dan Nugraeni (2023) di Kabupaten Sleman yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki peran yang relatif konsisten pada berbagai konteks pemerintah daerah. Namun, posisi akuntabilitas sebagai variabel paling dominan dalam penelitian ini memberikan temuan kontekstual bahwa pada Pemerintah Kabupaten Siak, aspek pertanggungjawaban aparatur memiliki peranan lebih kuat dibandingkan faktor sistem informasi dan transparansi dalam menjelaskan variasi kualitas pelaporan keuangan.

Temuan tersebut juga relevan dengan adanya temuan BPK mengenai kekurangan volume pada pekerjaan fisik dan persoalan penatausahaan aset serta pajak daerah. Temuan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan membutuhkan pertanggungjawaban yang tidak berhenti pada kelengkapan administratif, tetapi juga memastikan kesesuaian antara informasi yang dilaporkan dengan kondisi dan transaksi yang

sebenarnya. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas perlu dilakukan melalui peningkatan pengawasan, kepatuhan terhadap prosedur, kelengkapan bukti transaksi, serta penguatan pengendalian internal pada setiap OPD.

Pengaruh Penerapan SIPD, Transparansi Anggaran, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan secara Simultan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Secara simultan, Penerapan SIPD, Transparansi Anggaran, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan merupakan hasil dari interaksi antara aspek teknologi, keterbukaan informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Ketiga aspek tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pengelolaan keuangan. SIPD mendukung integrasi dan pengolahan informasi, transparansi menyediakan keterbukaan atas informasi keuangan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai *Adjusted R²* menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 56,2% variasi Kualitas Pelaporan Keuangan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki kontribusi yang cukup berarti, tetapi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah bersifat multidimensional. Faktor lain seperti kompetensi sumber daya manusia, efektivitas sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kepemimpinan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dapat turut memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hasil simultan tersebut sejalan secara umum dengan Gusliandi, Lubis, dan Azhar (2023) yang menemukan bahwa faktor-faktor tata kelola dan sistem informasi secara bersama-sama memiliki hubungan signifikan dengan kinerja pengelolaan keuangan. Namun, penelitian tersebut menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian ini secara khusus menguji kualitas pelaporan keuangan. Perbedaan objek tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini memberikan bukti yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan di Kabupaten Siak tidak cukup dilakukan hanya melalui digitalisasi sistem atau peningkatan keterbukaan informasi. Penguatan akuntabilitas perlu menjadi perhatian utama karena memiliki kontribusi relatif paling besar dalam model, sementara SIPD perlu terus dioptimalkan sebagai instrumen pendukung integrasi dan pengelolaan data. Di sisi lain, transparansi anggaran perlu diarahkan dari sekadar penyediaan informasi menuju keterbukaan

yang informatif, mudah dipahami, tepat waktu, dan dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme pengawasan. Pendekatan tersebut penting agar perbaikan kualitas pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan yang memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mencerminkan proses pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, jumlah responden yang dianalisis sebanyak 63 orang dari 78 kuesioner yang disebarkan, dengan tingkat pengembalian sebesar 80,77%. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh adanya kuesioner yang tidak diisi secara lengkap dan data responden yang kurang memenuhi kelengkapan informasi penelitian. Kedua, cakupan penelitian terbatas pada 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik organisasi, sistem pengelolaan keuangan, dan tingkat implementasi SIPD yang berbeda. Ketiga, penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data memungkinkan munculnya *social desirability bias*, yaitu kecenderungan responden memberikan jawaban yang dianggap sesuai dengan harapan atau kondisi ideal organisasi. Selain itu, perbedaan pemahaman responden terhadap pernyataan dalam kuesioner juga berpotensi memengaruhi konsistensi jawaban. Keempat, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,562 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 56,2% variasi kualitas pelaporan keuangan, sedangkan 43,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor di luar model, seperti kompetensi sumber daya manusia, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepemimpinan, dan budaya organisasi. Kelima, periode penelitian yang relatif singkat menyebabkan penelitian belum dapat mengamati perubahan kualitas pelaporan keuangan secara longitudinal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah dan cakupan responden, melibatkan pemerintah daerah dengan karakteristik yang berbeda, menggunakan kombinasi kuesioner dan metode pengumpulan data lainnya, serta menerapkan desain longitudinal untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dari 63 responden pada 26 OPD, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan nilai signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem terintegrasi mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan melalui single entry dan rekonsiliasi data real-time.
- Transparansi anggaran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan nilai. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi di Kabupaten Siak masih bersifat pasif (sekadar publikasi dokumen) dan belum diikuti partisipasi aktif masyarakat, sehingga belum mampu mendorong perbaikan kualitas laporan secara material.
- Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan nilai signifikansi. Variabel ini merupakan faktor paling dominan dibandingkan variabel independen lainnya yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan dan bukti transaksi yang sah menjadi kunci utama andalnya laporan keuangan.
- Secara simultan, SIPD, transparansi, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan variasi kualitas pelaporan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, dan komitmen organisasi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut, bagi Pemerintah Kabupaten Siak, penguatan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama mengingat variabel ini paling dominan pengaruhnya, dengan cara menegakkan sanksi atas pelanggaran administrasi, meningkatkan efektivitas SPI, serta menindaklanjuti temuan BPK atas kekurangan volume pekerjaan fisik dan penetapan PBB-P2. Selain itu, optimalisasi SIPD perlu dilakukan melalui pemeliharaan infrastruktur jaringan, pelatihan teknis berkelanjutan bagi operator, dan evaluasi berkala kepatuhan OPD dalam menggunakan sistem tunggal. Strategi transparansi juga perlu dievaluasi ulang agar tidak sekadar mempublikasikan dokumen, tetapi disajikan dalam format yang mudah dipahami masyarakat (infografis, ringkasan eksekutif) serta dilengkapi saluran partisipasi publik untuk pengawasan aktif. Penguatan kompetensi SDM di bidang keuangan melalui pelatihan rutin dan sertifikasi profesi juga sangat disarankan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, dan komitmen organisasi guna meningkatkan daya jelajah model (R^2), memperluas objek penelitian ke daerah lain, menggunakan pendekatan mixed methods untuk menggali data lebih mendalam, serta melakukan penelitian longitudinal untuk menangkap perubahan kualitas pelaporan dari waktu ke waktu. Penggunaan analisis jalur (path analysis) atau SEM juga dapat dipertimbangkan untuk menguji hubungan kausal yang lebih kompleks antar variabel.

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024 Nomor 17.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025. Pekanbaru: BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
- Aprilia, N., dkk. (2025). Pengaruh SAKD, Akuntabilitas, dan Penerapan SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(1), 45–58.
- Farika, L., dkk. (2023). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BAPENDA Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(2), 89–102.
- Fitriasari, D. (2024). Pengaruh Penerapan Aplikasi SIPD dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 112–125.
- Gusliandi, F., dkk. (2023). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Kota Langsa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(1), 45–58.
- Paat, F. F., & Saleh, S. A. (2023). Pengaruh Penerapan SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(2), 78–89.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak. Siak Sri Indrapura: Pemerintah Kabupaten Siak.
- Phita, A. V., dkk. (2025). Implementasi SIPD dalam Pengelolaan Anggaran Sebagai Upaya Mewujudkan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 23–35.
- Samsiah, S., dkk. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(3), 201–215.
- Sari, N. P., dkk. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(2), 67–79.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Vidyasari, R., & Suryono, B. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(2), 88–102.
- Yusina, N., dkk. (2025). Pengaruh Penerapan SIPD dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Gorontalo*, 6(1), 15–28.
- Zubaidah, A. N., & Nugraeni. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14(2), 123–136.